

Persepsi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Masa Pandemi Covid-19

Rofi' Ramadhona Iyoega^a, Afista Dwi Wardhani^b, Ira Lucyana^c

^{a,b,c} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ¹ rofi.r.iyoega@gmail.com, ² afistadwi123@gmail.com,

³ iralucyana29.il@gmail.com

Abstrak

Salah satu ciri negara demokrasi adalah dengan dilangsungkannya pemilihan umum (pemilu). Hal yang berbeda di tahun 2020 lalu adalah diselenggarakannya pemilu atau pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dalam situasi pandemic Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada serta tanggapan dari masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode survey sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui adanya pilkada, namun masih terdapat masyarakat yang berpandangan bahwa pilkada itu kurang penting atau tidak penting diselenggarakan di tengah pandemic Covid-19. Sosialisasi telah dilakukan dengan optimal, media sosial menjadi sumber informasi dominan masyarakat. Selain media sosial, masyarakat mendapatkan informasi melalui berita di televisi, internet, maupun sosialisasi langsung dari penyelenggara pemilu.

Kata kunci: pilkada, pandemi covid-19, sosialisasi

Public Perceptions of The Implementation of General Elections (Pilkada) During The Covid-19 Pandemic

Abstract

One of the characteristics of a democratic country is the holding of general elections. What is different in 2020 is the holding of elections or regional head elections (pilkada) in a situation of the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the policies taken by the government regarding the implementation of regional elections and the responses from the public. The research approach used is a qualitative approach with survey methods as data collection methods. The results showed that most people were aware of the existence of pilkada, but there were still many people who thought that the pilkada was less important or insignificant if it was held in the midst of the Covid-19 pandemic. Socialization has been carried out optimally, social media has become the dominant source of information for the community. Apart from social media, people get information through the news on television, the internet, and direct socialization from election organizers.

Keywords: pilkada, covid-19 pandemic, socialization

A. PENDAHULUAN

Kondisi yang terjadi di seluruh dunia saat ini khususnya di Indonesia Covid-19 masih saja belum mereda dan menemukan jalan keluar. Angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Dari data yang dihimpun melalui portal *covid19.go.id* sampai dengan akhir tahun lalu Indonesia memiliki lima ratus ribu lebih kasus positif Covid-19. Berbagai penanganan dikerahkan pemerintah Indonesia guna mengurangi penyebaran virus Covid-19, banyak sekali protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk diterapkan di masyarakat. Namun, masyarakat masih saja abai dengan virus ini dengan tidak menaati peraturan pemerintah serta mengabaikan protokol kesehatan.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemilu serentak tahun 2020 telah dilaksanakan dalam kondisi wabah yang masih belum meredup di Indonesia. Sebelumnya pemilu serentak untuk memilih kepala daerah ini sudah ditunda dari bulan September hingga bulan Desember. Banyak pro dan kontra terkait dengan penyelenggaraan pilkada ditengah pandemic. Usulan penundaan pemilu ini juga disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah untuk alasan kemanusiaan dan mencegah penyebaran virus Covid-19. Bawaslu mencatat ada 373 pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan kampanye periode keenam atau periode 15-24 November 2020 pilkada serentak tahun 2020 (Kompas, 2020). Diharapkan dalam pelaksanaan pilkada saat pandemi ini masyarakat tetap konsisten dan optimis dalam memenuhi haknya untuk memilih pasangan calon yang baik untuk masa depan negara.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada, seperti dengan adanya penjadwalan terkait dengan pemberian hak suara pada saat pemilu berlangsung agar menghindari terjadinya kerumunan, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, tersedianya tempat untuk mencuci tangan di lokasi TPS, dan tetap menjaga jarak antara pemilih yang satu dengan yang lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam pilkada ditengah pandemic Covid-19 dikhawatirkan akan menurun. Karena banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan berpartisipasi, penelitian yang dilakukan oleh

Wulandary (2016) menemukan empat faktor diantaranya adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ketidaktertarikan pada politik, perbedaan ideologi, dan juga faktor keadaan (teknis).

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan ditentukan secara *purposive sampling* yaitu dari unsur penyelenggara pemilu atau KPU yang dalam hal ini adalah anggota KPU Kabupaten Sragen dan salah seorang tim sukses pasangan calon sebagai peserta pilkada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pengambilan data dilakukan dengan metode survey melalui penyebaran angket secara online dengan menggunakan *google form* kepada responden yang ditentukan secara *random* sebanyak 100 orang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemilihan umum kepala daerah (pilkada) ditengah pandemic Covid-19.

B. PEMBAHASAN

Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada

Dasar hukum Pilkada serentak tahun 2020 yakni Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2020 tentang Perubahan atas UU No 1/2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU atau dapat kita maknai sebagai Peraturan Pengganti Undang-undang Pilkada yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2020. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 juga telah dilakukan penundaan yakni dari tanggal 23 September 2020 bergeser ke tanggal 9 Desember 2020. Alasan penundaan tak lain ialah karena adanya covid-19 yang masih belum surut. Namun disisi lain pemerintahan harus tetap berjalan. Adanya covid-19 ini dalam Pilkada selain menjadi sebuah tantangan bagi para calon kepala daerah juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pemecahan masalah covid-19 ini. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Nova Tri Wibowo (NV) selaku staff KPU:

"Pandemi ini kan kita nggak tahu ya kapan berakhirnya dan tidak ada seorangpun yang dapat memastikan kapan berakhir dan pemerintahan harus tetap bertjalan." (NV, Olahan Peneliti, 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh Rafif Abrar Setyahadi (RF) salah seorang peserta Pemilu:

"...Pilkada bersama dengan pandemi merupakan momentum untuk melahirkan pemimpin-pemimpin seorang negarawan yang dapat Menghasilkan solusi substansial digunakan di tengah pandemic, perbedaannya dengan pilkada-pilkada yang biasa ya tentu pemimpin-pemimpin yang berkontestasi di masa pandemi ini mereka akan di challenges bagaimana sih caramu cara untuk menyelesaikan pandemic. Bagaimana sih yang akan kamu terapkan nanti ketika dihadapkan pada krisis seperti ini. Bagiku mental pemimpinnya akan lebih matang dan teruji" (RF, Olahan Peneliti, 2020).

Pilkada penting dilaksanakan agar pemerintahan kembali berjalan dan diharapkan pilkada menjadi solusi untuk melahirkan pemimpin yang dapat menanggulangi Covid-19 di masing-masing daerah. Pandemi bukan penghalang untuk melaksanakan sebuah pesta demokrasi, karena pihak penyelenggara yakni KPU sudah meminimalisir terjadinya kluster baru di penyelenggaraan Pilkada desember lalu. Lebih jauh NV menyampaikan:

"Diantaranya setiap pemilih akan dicek suhu badanya sebelum memasuki TPS, mendapat sarung tangan plastic yang digunakan untuk mencoblos di bilik suara, penetesan tinta, penyemprotan berkala menggunakan disinfektan setiap pergantian jam pemilih."(NV, Olahan Peneliti, 2020)

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa KPU sudah menjadikan protocol kesehatan sebagai landasan dalam menyelenggarakan pilkada serentak tersebut. KPU secara umum juga telah mendesain proses pemungutan suara, untuk pelaksanaan pemilihan ini KPU telah berkali-kali melaksanakan simulasi dalam pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU juga telah mengeluarkan regulasi khusus sehubungan dengan penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 dan telah melakukan berbagai inovasi saat pencoblosan dan penghitungan suara.

Salah satu inovasi tersebut berupa alur atau tata cara dalam pemilihan Pilkada. Berhubung kita melaksanakannya ditengah pandemi, yang mana dibutuhkan peralatan ekstra untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Maka alur atau tata cara pada pemilihan kepala daerah nanti dapat diikuti dengan cara: *Pertama*, pada saat

pemilih tiba, mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu dan menjaga jarak aman sekurang-sekurangnya satu meter pada saat antri masuk ke TPS. *Kedua*, pemilih menggunakan alat tulis masing-masing untuk mendaftar ke petugas KPPS. *Ketiga*, menggunakan sarung tangan plastik yang disediakan petugas KPPS dan pemilih duduk dalam antrian, jika sudah mendapat giliran ketua KPPS akan langsung menyuruh pemilih menuju bilik suara. *Keempat*, setelah pemungutan suara selesai, segera lepaskan salah satu sarung tangan plastik dan tempelkan tinta ke jari untuk menunjukkan bahwa telah memilih. *Kelima*, lepaskan sarung tangan plastik, kemudian buang ke tempat yang telah disediakan. *Keenam*, pemilih kembali mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di luar TPS. Pemilih yang telah memenuhi hak pilihnya agar segera kembali ke rumah masing-masing, untuk menghindari keramaian di sekitar TPS.

Selain tata cara dalam pemilihan, KPU juga telah menyiapkan antisipasi untuk keadaan darurat seperti pakaian hazmat atau baju APD yang diperuntukkan bagi petugas KPPS. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penularan virus, apabila dalam pemilihan berlangsung ada pemilih yang tiba-tiba pingsan atau terjatuh di TPS karena diduga terinfeksi virus Covid-19. Dalam hal ini, KPU juga telah menyediakan satu bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya melebihi 37,3°C. Disebutkan bahwa petugas yang ada di TPS akan menyemprotkan disinfektan secara berkala dalam waktu dua jam sekali selama pemilihan berlangsung.

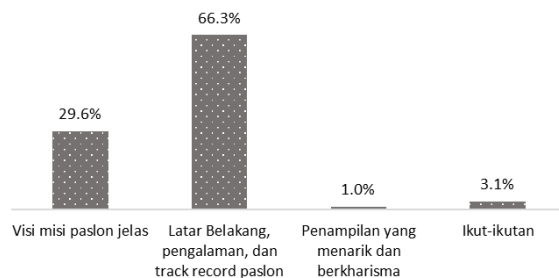
Persepsi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pilkada

Di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, pemilihan kepala daerah (pilkada) akan tetap dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat yang akan memilih paslon dengan menggunakan hak pilihnya. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar masyarakat sebanyak 48% menyatakan bahwa pilkada itu penting untuk tetap dilaksanakan, 36.7% beranggapan bahwa pilkada itu kurang penting, dan sisanya sebanyak 15.3% menyatakan bahwa pilkada itu tidak penting dan perlu dilakukan tinjauan ulang atas kebijakan tersebut.

Diantara masyarakat yang setuju mengatakan bahwa pandemic tidak boleh menghalangi demokrasi, sebagian lagi mengatakan jika masyarakat tetap mampu untuk menerapkan protocol kesehatan secara disiplin maka tidak masalah jika pilkada tetap dilangsungkan. Bahkan diantara masyarakat yang setuju memberikan usulan agar pemilihan diselenggarakan secara online saja sehingga tidak harus keluar rumah yang nantinya berpotensi terjadi penularan.

Diantara masyarakat yang menyatakan bahwa pilkada ini tidak penting atau tidak tepat jika dilaksanakan ditengah pandemic beranggapan bahwa pemerintah harus lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya dengan kata lain nyawa jauh lebih penting dibandingkan pilkada. Sebagian masyarakat yang kontra dengan kebijakan ini pun beranggapan bahwa tidak banyak perubahan yang diberikan oleh pemerintah, karena masih banyak hal lain yang lebih penting untuk dijadikan fokus dan tindak lanjut (*follow up*).

Masyarakat masih menaruh harapan yang besar agar pilkada tersebut dapat benar-benar menghasilkan pemimpin yang amanah. Masyarakat memahami dengan baik kriteria memilih pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan pemimpin yang baik dapat dilihat dari latar belakang/pengalaman dan juga visi misi yang dimilikinya. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 1. berikut ini.



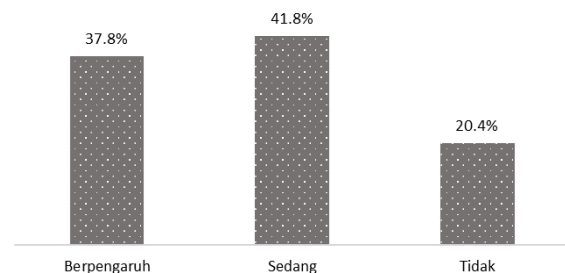
Gambar 1. Alasan Memilih Pemimpin

Dari diagram lingkaran diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat memahami kriteria dalam memilih seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin di daerahnya tersebut yaitu dengan memilih calon bupati atau calon walikota

berdasarkan latar belakang/pengalaman/track record cabup-cawabup/cawalkot dan visi misi cabup/calwal jelas. Tetapi masih ada juga masyarakat yang memilih berdasarkan penampilan paslon yang menarik dan berkharisma serta masih ada juga masyarakat yang ikut-ikutan dalam memilih paslon yang akan mereka jadikan sebagai pemimpin daerahnya tersebut.

Untuk itu jadilah pemilih yang cerdas, amati serta kaji karakteristik paslon yang akan dijadikan sebagai pemimpin, yaitu pertama anti *money politic*, yakni pemilih yang menentukan pilihannya bukan karena ada motif imbalan materi atau menerima sejumlah uang yang dikenal dengan suap uang. Kedua, tidak asal memilih paslon, tetapi harus memilih secara tanggung jawab dan dianggap mampu membawa kemajuan serta kesejahteraan untuk daerahnya. Ketiga, yaitu visi, misi dan *platform* yang dibawa oleh calon kepala daerah, menjadi bahan pertimbangan utama dalam membuat keputusan definitif. Keempat, menjadi pemilih yang selalu belajar dari pengalaman empiris terkait banyaknya pejabat daerah yang terkena kasus korupsi. Pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang memiliki visi, misi dan program yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Untuk dapat memperoleh kemenangan dalam pemilu. Paslon harus merenggut hati pemilihnya salah satunya melalui janji politik yang disampaikan saat kampanye. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa kampanye sangat besar pengaruhnya terhadap pilihan mereka. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 2. berikut ini.



Gambar 2. Pengaruh Kampanye Politik

Gambar 2. menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang beranggapan bahwa kampanye tidak berpengaruh terhadap penentuan hak pilih pada saat pilkada cukup tinggi yaitu 20.4%. Kampanye merupakan kegiatan yang terorganisir dan sistematis dalam mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan dengan menggunakan metode dan media tertentu. Kampanye tersebut dilakukan oleh peserta pemilu untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari calon pemilih, sehingga nantinya dapat memilih calon yang dikampanyekan. Kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu dan kandidat tertentu. Dengan kata lain, tujuan kampanye pemilu sesungguhnya untuk menyandera kesadaran politik masyarakat agar partai dan juga kandidat yang melakukan kampanye memperoleh citra positif dan mendapatkan simpati dari masyarakat.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, rata-rata masyarakat berpendapat bahwa pada saat kampanye banyak paslon yang hanya mengucapkan janji, namun setelah terpilih janji itu tidak dilaksanakan. Lalu kampanye bukan satu satunya cara untuk menentukan hak pilih saat pilkada dan tidak sepenuhnya yang menentukan hak pilih saat pilkada, sehingga masyarakat harus mengetahui informasi paslon yang akan dipilih dari sumber yang lainnya. Seperti dengan mencari tahu sendiri tentang latar belakang, pengalaman kerja dari paslon yang akan mereka pilih. Tetapi dari kampanye juga masyarakat dapat mengetahui visi dan misi dari para paslon secara langsung dan bisa lebih mengetahui seberapa giat para paslon untuk menyakinkan masyarakat agar memilih dia lewat visi dan misi yang diucapkan. Selain itu, kampanye menjadi ajang partai politik untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih parpol yang terkait agar masyarakat tidak salah pilih dalam memilih calon pemimpin di masa yang akan datang.

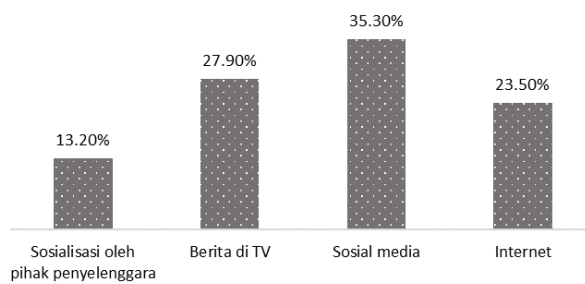
Sosialisasi Pilkada kepada Masyarakat

Sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan di tengah

pandemic Covid-19 ini. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 70% masyarakat mengetahui bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan dengan menaati protocol kesehatan yang ketat. Sebagian lagi sebanyak 30% belum mendapatkan informasi seputar pelaksanaan pilkada ini. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita berusaha untuk mencari tahu informasi sebanyak mungkin terkait dengan pilkada agar kita mengetahui apa yang membedakan antara penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi dengan penyelenggaraan pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Jika telah mendapatkan informasi, maka akan lebih siap untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS dan tidak akan mengalami kesulitan dalam memberikan suara karena memahami dengan baik tata cara penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi.

Karena tidak ada salahnya jika kita mencari-cari informasi terkait dengan penyelenggaraan di tengah pandemi. Karena informasi tersebut sangat berguna untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa menyiapkan terlebih dahulu terkait apa saja yang kita perlukan dan siapkan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada. Dengan itu, kita menjadi lebih siap untuk datang ke TPS karena telah berbekal ilmu dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi yang berupa tata cara melakukan pemilihan di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat.

Disisi lain sosialisasi penyelenggaraan pilkada harus didorong untuk lebih massif lagi. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berupaya semaksimal mungkin agar pesan atau informasinya secara lebih luas tersampaikan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara masih sangat minim. Hanya 13.20% masyarakat yang mendapatkan informasi dari KPU terkait penyelenggaraan pemilu ini. Sebagian besar masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial yaitu sebesar 35.30%. Untuk informasi detailnya dapat diamati pada gambar 4. berikut ini.



Gambar 4. Sumber Informasi Pilkada

Gambar 4. menunjukkan sosial media memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai penyebar informasi. Sosial media dianggap sebagai media paling mudah digunakan untuk mengakses berbagai informasi salah satunya informasi terkait dengan pilkada apalagi di kalangan generasi muda. Sumber informasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, sebenarnya dapat kita peroleh darimana saja baik dari sosial media, internet, berita di TV ataupun sosialisasi oleh pihak penyelenggara. Tidak menjadi permasalahan yang besar jika kita mendapatkan informasi dari sumber yang berbeda asalkan kita teliti dan menggunakan sumber yang terpercaya agar kita tidak mendapatkan berita *hoax*. Lebih baik lagi jika kita tidak hanya menggunakan satu sumber untuk mendapatkan informasi tetapi menggunakan beberapa sumber agar informasi yang kita dapatkan jauh lebih akurat dan terpercaya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan pilkada ditengah pandemi menjadi suatu hal yang baru untuk masyarakat Indonesia saat ini, pasalnya upaya pemerintah dalam menyiapkan pesta demokrasi ini harus diikuti dengan menerapkan protokol kesehatan yang mumpuni, sehingga ketika masyarakat tengah melaksanakan kegiatan tersebut dengan memberikan hak pilihnya disisi lain pun masyarakat merasa aman karena tidak terjangkau pandemi tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pilkada ditengah pandemi yaitu dengan adanya penjadwalan terkait dengan pemberian hak suara pada saat pemilu berlangsung guna menghindari terjadinya kerumunan, penyediaan bilik suara

khusus bagi masyarakat bersuhu tinggi, serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada ditengah pandemi ini sangat beragam ada yang memberikan dukungannya namun ada yang tidak. Mereka yang menolak penyelenggaraan pilkada mengkhawatirkan akan munculnya klaster baru penyebaran virus covid 19. Pemerintah telah melakukan upaya dengan maksimal untuk mengamankan berlangsungnya pilkada dengan berbagai regulasi untuk mengatasi penyebaran covid 19 pada saat pelaksanaan pemilu. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan hak suaranya. Adapun sosialisasi penyelenggaraan pilkada perlu ditingkatkan lagi intensitasnya. Sebagai penyelenggara pilkada, KPU dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat seputar pilkada. Media sosial terbukti sangat efektif dan efisien sebagai penyebar informasi.

Penyelenggaraan pilkada ditengah pandemic penting untuk memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah: 1) Peningkatan sarana dan sarana penunjang pelaksanaan pilkada seperti penyediaan masker, tempat mencuci tangan dan atau *handsanitizer*, dan lain-lain; 2) Patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan antara lain menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak; 3) Datang ke TPS sebagaimana jadwal yang telah di tentukan, hal tersebut dilakukan guna menghindari terjadinya kerumunan di lokasi pemungutan suara atau TPS; dan 4) Gunakanlah hak suara dengan bijak.

REFERENSI

- DIY KPU. (2016). Pengertian, Fungsi dan Sistem Pemilihan Umum. Retrieved from <https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>.
- Hanafi, R.I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*. 11(2), 1-16.
- Nopyandri. (2011). Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 (2), p 1-14.
- Nurhanisah, Y. (2019). Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu, Apa saja?. Retrieved

from <http://indonesiabaik.id/infografis/tiga-lembaga-penyelenggara-pemilu-apa-saja>.

Perdana, A., dkk. 2019. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Rahmatunnisa, M. 2017. Mengapa Integritas Pemilu Penting?. Jurnal Bawaslu. Vol 3 (1), p 1-11.

Seputar Pengetahuan. (2017). Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Asas, Bentuk & Sistemnya. Retrieved from https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html#Pengertian_Pemilu.

Wulandary, Roro M.C. 2016. Persepsi Masyarakat terhadap Golput pada Pemilukada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010. Jurnal REFORMASI. Vol 6 (1), p 58-65.